

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era demokrasi saat ini, masyarakat Indonesia dapat dengan bebas berpendapat dan mengontrol kebijakan pemerintah. Namun kebebasan yang diberikan merupakan salah satu faktor pemicu masyarakat dalam menuntut pemerintah agar dapat bekerja dengan semestinya. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah pemerintah daerah dituntut untuk memberikan informasi keuangan kepada publik, DPRD, dan pihak-pihak yang menjadi stakeholder pemerintah daerah. Dengan itu pemerintah daerah perlu mempunyai sistem akuntansi dan standar akuntansi keuangan pemerintah daerah yang cukup memadai (Mardiasmo, 2009 : 26).

Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 dan telah diubah menjadi Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang melahirkan paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah, dan Undang- Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah daerah serta pemerintah pusat. Berlakunya Undang- Undang diatas tersebut juga mempunyai konsekuensi dalam pelaksanaan otonomi daerah yang memerlukan banyaknya pembiayaan yang harus dipikul dan menjadi tanggung jawab daerah, tidak dapat lagi mengandalkan pemerintah pusat. Oleh karena itu, peran dan tanggungjawab dalam

pembangunan daerah menjadi milik masing-masing daerah itu sendiri dengan melibatkan seluruh pihak seperti pemerintah, masyarakat sipil, dan dunia usaha (Helmizar, 2017 : 38).

Sektor publik dirubah untuk mengganti sistem dan model pemerintahan lama ke sistem pemerintahan baru berharap dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, demokratisasi, pemerintahan yang lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel, meningkatkan kinerja, pelayanan publik yang lebih baik dan adil (Mahmudi, 2015 : 34).

Sehingga akuntansi sektor publik berkembang pesat isu yang muncul dalam sektor publik merupakan suatu rangkaian yang akhirnya merupakan tuntutan diciptakannya *good public atau corporate governance*. Serta tuntutan dengan dilakukannya suatu reformasi sektor publik yang diorientasikan pada suatu pembentukan organisasi sektor publik yang ekonomis, efisien, efektif, transparan, responsif, dan memiliki akuntabilitas yang tinggi (Mardiasmo, 2018 : 22).

Kinerja adalah hasil kerja itu sendiri, karena hasil kerjanya memberikan keterkaitan yang kuat terhadap tujuan-tujuan strategi organisasi, kepuasan pelanggan, dan kontribusi ekonomi (Mahmudi, 2015 : 6) yang dikutip oleh (Roger, 1994). Sedangkan kinerja organisasi merupakan tanggungjawab setiap individu yang bekerja dalam organisasi, apabila dalam organisasi setiap individu bekerja dengan baik, berprestasi, bersemangat, dan memberikan kontribusi terbaik mereka terhadap suatu organisasi, maka dengan itu kinerja organisasi secara keseluruhan akan menjadi baik. Kinerja individu ini

dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : pengetahuan, keterampilan, kemampuan, motivasi, peran (Mahmudi, 2015 : 21).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam membawa perubahan terhadap pembentukan pada Perangkat Daerah, dengan prinsip tepat fungsi dan ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi di daerahnya masing-masing. Hal ini juga sejalan dengan prinsip organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Good Government Governance merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi yang sering diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik dan dapat didefinisikan cara kekuatan negara digunakan dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk pengembangan masyarakat serta pelaksanaan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi untuk mengelola perpindahan suatu negara di semua tingkatan (Mardiasmo, 2018 : 22).

Seluruh aktivitas operasional pemerintah daerah akan berjalan dengan baik apabila pelaksanaan good government governance dapat berjalan dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan ekonomis maka hal tersebut dapat berdampak terhadap kinerja pemerintah daerah secara finansial maupun nonfinansial yang juga membaik (Mardiasmo, 2018 : 26).

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja organisasi yaitu Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemerintah dalam menyampaikan pertanggungjawaban untuk mengelola sumber daya, pelaporan, dan pengungkapan segala aktivitas-aktivitas serta kegiatan-kegiatan yang

berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak yang sudah memberikan mandat. Akuntabilitas publik yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik atau lembaga-lembaga publik yaitu : akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, akuntabilitas finansial atau keuangan (Mahmudi, 2015 : 9).

Adapun faktor lain yang mempengaruhi kinerja organisasi yaitu Sistem Pengendalian Manajemen karena jika sistem pengendalian manajemen berjalan dengan baik maka seluruh operasional organisasi perangkat daerah juga dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan tujuan (Widodo, 2007).

Fenomena yang terjadi pada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negeri dan Reformasi Birokrasi tata kelola Pemerintahan Provinsi Banten sudah cukup baik dalam Transparansi atau keterbukaan dalam memberikan informasi tetapi masih harus ada evaluasi karena dinilai ada hal yang harus dikoreksi berkaitan dengan Rencana Program Jangka Menengah Daerah. Evakuasi itu biasa dilakukan dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Sedangkan untuk penilaian Kinerja instansi pemerintah pada Pemerintah provinsi Banten sudah baik, karena mendapatkan ranking ketiga dalam upaya pencegahan korupsi. (Difa, 2019).

Fenomena lainnya yang terkait yaitu, Tingkat akuntabilitas pemerintah daerah atau pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan di lingkup Pemerintah provinsi Kalimantan timur sudah baik, tetapi anehnya penilaiannya terindikasi menurun sebab belum mencapai nilai A. Tahun tahun sebelumnya nilainya

selalu B dan C Jadi belum ada peningkatan. Maka perlu adanya satu persepsi atau pemahaman yang sama bagi seluruh pegawai atau aparatur di segala lini di Pemerintah provinsi Kalimantan timur dalam keterbukaan tentang keuangan.

Sedangkan Pemerintah provinsi Kalimantan timur dalam kinerjanya boleh dikategorikan baik dan akuntabel. Karena hasil kinerja dan komitmen yang tinggi di jajaran aparturnya dan berharap seluruh aparatur di segala lini untuk kembali meningkatkan komitmen dan tekad kinerja yang kuat. Didasari ketulusan bekerja untuk menciptakan akuntabilitas keuangan pemerintahan yang baik. Pemerintah terus melakukan evaluasi mekanisme dan tata kerja proses percepatan pelaksanaan berbagai kegiatan dari awal hingga akhir. Selain itu, pemerintah terus memberikan berbagai motivasi agar kinerja selalu meningkat. (Muhammad Sabani, 2020).

Fenomena lainnya yaitu Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sejak tahun 2019 telah menerapkan Sistem Pengendalian Manajemen Pemerintah. BPPSPAM telah memiliki arah kebijakan dan program peningkatan kinerja BUMD air minum tahun 2020-2024 yang telah di sesuaikan dengan target RPJMN 2020-2024 sehingga kinerjanya dapat meningkat dan dinyatakan baik.

Tetapi untuk meningkatkan efektifitas penanganan pelaksanaan program dan kegiatan BPPSPAM masih perlu dilakukan evaluasi dalam sistem pengendalian manajemen yang telah dibuat sejak dari proses perencanaan, dan

ada beberapa perumusan strategi atau kerangka kerja dan penganggaran yang harus dirubah atau di evaluasi dalam suatu sistem agar tidak terjadinya kegagalan dalam suatu program atau kegiatan (Andreas, 2020).

Fenomena khusus yang terjadi di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta yang menyatakan bahwa masih ada permasalahan dalam Good Government Governance terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Good Government Governance di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan tata kelola yang belum maksimal terutama dalam transparansi atau keterbukaan dalam memberikan informasi kepada publik masih belum optimal dan masih banyak yang harus dievaluasi, faktor tersebutlah yang menyebabkan terjadinya permasalahan di tata kelola pemerintahan, tetapi dalam kinerja OPD nya sudah sangat baik terutama pada faktor perencanaan dan penganggaran sehingga mengakibatkan kinerja OPD berkualitas (Dede Sanusi, Kepala Kecamatan Kabupaten Purwakarta, 2020).

Penelitian terdahulu HifzaInam dan Mukthar (2014) menyebutkan bahwa tata kelola yang baik dalam suatu organisasi akan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi tersebut. Sedangkan Meidawati (2012) dalam Rido (2014) menyatakan bahwa akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja Pemerintah Daerah, hasil dari penelitian terdahulu membuktikan bahwa akuntabilitas dalam pemerintahan daerah diperlukan guna mewujudkan suatu kondisi yang akuntabel dalam pemerintahan daerah. Penelitian Daniel (2012) yang

menyimpulkan bahwa sistem pengendalian manajemen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja SKPD.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis memilih judul **“Pengaruh Good Government Governance, Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi masalah yang terjadi adalah sebagai berikut :

1. Tata kelola Pemprov Banten sudah cukup baik tetapi masih harus dilakukan evaluasi karena dinilai ada hal yang harus dikoreksi berkaitan dengan Rencana Program Jangka Menengah Daerah dan OPD yang belum melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan baik. Sedangkan penilaian Kinerja instansi pemerintah untuk Pemprov Banten sudah baik.
2. Sistem Akuntabilitas keuangan di lingkup Provinsi Kaltim masih rendah bahkan terindikasi menurun sebab belum mencapai nilai A jadi masih belum ada peningkatan. Padahal Pemprov Kaltim dalam kinerjanya boleh dikategorikan baik dan akuntabel, itu adalah hasil dari kinerja dan komitmen yang tinggi di jajaran aparaturnya.
3. Diterapkannya Sistem Pengendalian manajemen Pemerintah agar dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah, akhirnya kinerjanya dapat

meningkat dan dinyatakan baik. Tetapi untuk sistem pengendalian manajemennya masih harus banyak dievaluasi karena untuk mengantisipasi kegagalan program.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah didapat, penulis dapat menyebutkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh Good government governance terhadap kinerja organisasi perangkat daerah.
2. Seberapa besar pengaruh Akuntabilitas keuangan daerah terhadap kinerja organisasi perangkat daerah.
3. Seberapa besar pengaruh sistem pengendalian manajemen terhadap kinerja organisasi perangkat daerah.

1.4 Maksud & Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mencari kebenaran atas pengaruh good government governance, akuntabilitas keuangan daerah dan sistem pengendalian manajemen terhadap kinerja organisasi perangkat daerah. Dengan menggunakan data yang diperoleh guna untuk memecahkan suatu masalah.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui besar pengaruh Good government governance terhadap kinerja organisasi perangkat daerah.
2. Untuk mengetahui besar pengaruh Akuntabilitas keuangan daerah terhadap kinerja organisasi perangkat daerah.
3. Untuk mengetahui besar pengaruh sistem pengendalian manajemen terhadap kinerja organisasi perangkat daerah.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini penulis harapkan dapat digunakan untuk memecahkan masalah mengenai kinerja organisasi perangkat daerah. Dan juga dapat dijadikan informasi yang berguna tentang good government governace, akuntabilitas keuangan daerah dan sistem pengendalian manajemen terhadap kinerja organisasi perangkat daerah, sehingga untuk perkembangan selajutnya menjadi lebih baik lagi dan dapat dijadikan pembelajaran dalam memperbaiki kekurangan yang ada.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Adapun kegunaan penelitian ini untuk memperbaiki good government governace, akuntabilitas keuangan daerah dan sistem pengendalian manajemen terhadap kinerja organisasi peragkat daerah, penelitian ini bagi mahasiswa dapat dijadikan pembanding dalam

penelitian lebih lanjut pada bidang kajian ini. Penelitian ini juga akan menjadi pembelajaran yang sangat membantu dalam meningkatkan kapasitas belajar dan pengalaman yang berkaitan dengan kondisi yang ada didalam masyarakat terutama yang berkaitan langsung dengan bidang akuntansi sektor publik.